

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank merupakan lembaga keuangan yang menyediakan dana baik itu digunakan untuk investasi atau untuk konsumsi. Selain itu lembaga keuangan tersebut juga sebagai tempat penyimpanan uang. Lembaga keuangan Bank di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Jo Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, selanjutnya disebut dengan UU Perbankan. Pada pasal 1 angka 2 UU Perbankan tersebut disebutkan bahwa Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak .

Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) meliputi lembaga pembiayaan (*leasing*, modal ventura, pembiayaan konsumen, dan kredit kecil), usaha perasuransian, dana pensiun, pasar modal, dan pegadaian. (Simorangkir, 2000: 27).

Bank dapat secara langsung menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka. Sedangkan lembaga keuangan non bank tidak dapat secara langsung menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito berjangka. (Chulyatul Mufidah, diunduh pada tanggal 15 desember 2013)

Pada praktiknya selain terdapat lembaga keuangan bank dan non bank dengan sistem yang konvensional, dikenal pula adanya lembaga keuangan bank dan non bank dengan prinsip syariah. Berikut ini adalah tabel tentang perbedaan sistem konvensional dan prinsip syariah.

Tabel 1. Perbedaan Sistem Konvensional dan Prinsip Syariah

<b>Sistem Konvensional</b>	<b>Prinsip Syariah</b>
Sistem bunga	Prinsip bagi hasil
Penyediaan dana berdasarkan perjanjian pinjam meminjam disebut kredit.	Penyediaan dana berdasarkan akad disebut pembiayaan.
Hubungan hukum antara lembaga keuangan dengan nasabah disebut kredir dan debitur.	Hubungan hukum antara lembaga keuangan dengan nasabah disebut kemitraan.

(Sumber: Achsan, diunduh tanggal 23 Mei 2013)

Lembaga keuangan dengan prinsip syariah mulai masuk dan berkembang di Indonesia, karena dipengaruhi oleh konferensi ekonomi Islam yang pertama pada tahun 1975 di Mekah. Dua tahun kemudian lahir Bank Pembangunan Islam (*Islamic Development Bank/IDB*). Kelahiran IDB telah memberikan inspirasi yang sangat berharga bagi pendirian dan perkembangan bank-bank syariah di berbagai negara Islam, terutama negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, salah satunya yaitu Indonesia.

Lembaga keuangan syariah mulai muncul di Indonesia, setelah pada tanggal 18-20 Agustus 1990 diselenggarakan lokakarya bunga bank dan Perbankan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pada tanggal 22-25 April 1990 hasil lokakarya tersebut dilanjutkan dan dibahas oleh MUI. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional (Munas) IV MUI yang diselenggarakan tanggal 22-25 Agustus 1990 di Jakarta, yang

menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Hasil kerja tim Perbankan MUI tersebut membuahkan hasil yaitu, berhasil mendirikan Bank Muamalat Indonesia (BMI). Berdirinya BMI memberikan inspirasi untuk membangun perekonomian., kemudian muncul lembaga keuangan dengan prinsip syariah yang lain seperti Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). (Ridwan Muhammad, 2004:71-73)

Perkembangan BMT di Indonesia cukup pesat, ini dibuktikan dengan semakin banyak BMT di berbagai daerah. Akan tetapi pada saat pertengahan 1990-an belum ada peraturan khusus tentang koperasi syariah. Pada pertengahan tahun 1990-an, beberapa BMT yang awalnya terkait Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk), Dompot Dhuafa, Muhammadiyah, dan ormas lain, maupun yang secara independen didirikan oleh seorang atau sekelompok orang peduli, diantaranya adalah: BMT Tamzis, Wonosobo (1992); BMT Binama, Semarang (1992), BMT Bina Umat Sejahtera, Rembang (1995); BMT Marhamah, Wonosobo (1995)); BMT Ben Taqwa, Purwodadi (1996); BMT At Taqwa, Pemalang (1996); BMT Marsalah Mursalah lil Ummah, Pasuruan (1997); dan lain-lain. (islamicfinance, diunduh 4 Mei 2013)

Adanya perkembangan BMT yang cukup pesat, serta peran penting yang dijalankan BMT dalam memberdayakan ekonomi masyarakat khususnya sektor usaha mikro, kecil dan menengah, menyebabkan pemerintah menerbitkan regulasi tentang koperasi jasa keuangan syariah, yaitu dengan menerbitkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Kepmen tersebut mengacu pada peraturan perkoperasian yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 25 tahun Munculnya peraturan tersebut membuat keberadaan koperasi syariah atau BMT

diakui dan dilindungi oleh pemerintah. Hal-hal tersebut berarti BMT-BMT yang ada telah mempunyai kepastian hukum bagi BMT.

Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2004 tersebut menyebabkan semakin banyak BMT lainnya yang muncul di berbagai daerah. Perkembangan BMT di daerah Jawa Tengah cukup pesat contohnya yaitu BMT Bima (Magelang), BMT Perkasya (Semarang), BMT AL-HUDA (Wonosobo, Jateng). (Puskopsyah BMT Jawa tengah, diunduh tanggal 10 Desember 2013)

Sementara itu BMT juga terdapat di luar pulau Jawa seperti BMT Duta Jaya (Lampung), BMT Darussalam Kaltim (Kaltim), BMT Bina Madani (Sumsesl). Hal ini menunjukkan bahwa dengan munculnya Kepmen KUKM tahun 2004 menjadikan BMT semakin berkembang pesat. (Puskopsyah, diakses pada tanggal 10 Desember 2013)

Prioritas BMT adalah menyalurkan dana untuk pengusaha mikro, kecil dan menengah, sehingga banyak pengusaha mikro, kecil dan menengah tertarik dengan pembiayaan di BMT. Selain menggunakan prinsip bagi hasil yang dianggap lebih menguntungkan dan jauh dari bunga yang dianggap riba, BMT menjadi alternatif pilihan untuk para pengusaha mikro, kecil, dan menengah karena akses dan prosedur yang mudah dalam peminjaman dana, jika dibandingkan dengan proses peminjaman dana melalui lembaga keuangan Bank. Hal ini menyebabkan konsep penyaluran dana semakin berkembang, yaitu

dibuktikan dengan adanya berbagai bentuk pembiayaan baik itu yang bersifat konsumtif dan produktif.

Salah satu bentuk pembiayaan yang bersifat produktif dan ditujukan kepada pengusaha mikro, kecil dan menengah adalah pembiayaan *musyarokah*. Pada pasal 1 angka 10 Kepmen Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 disebutkan bahwa “pembiayaan *musyarokah* adalah akad kerjasama permodalan usaha antara koperasi dengan satu pihak atau beberapa pihak sebagai pemilik modal pada usaha tertentu, untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha bersama dalam sebuah kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai kesepakatan para pihak, dan apabila rugi ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi”. Dengan demikian, pembiayaan *musyarokah* merupakan transaksi investasi dalam rangka penyediaan modal usaha yang dilakukan secara bersama dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah tertentu yang proporsional berdasarkan kesepakatan.

Keberadaan BMT saat ini telah diikat oleh beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, segala hal yang dilakukan BMT termasuk produk-produk yang dikeluarkan BMT harus sesuai dengan Kepmen KUKM tahun 2004. Selain itu, harus sesuai pula dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Meskipun demikian ternyata dalam praktiknya masih ditemui beberapa BMT yang bermasalah, baik permasalahan itu muncul dari pihak BMT atau dari mitra.

Adapun BMT yang bermasalah, contohnya seperti di daerah Yogyakarta. BMT yang bermasalah di Yogyakarta sekitar 10% dari jumlah BMT yang ada, tetapi ini cukup mencoreng lembaga BMT karena nilai rupiah dan kerugian masyarakat yang cukup besar. BMT yang bermasalah yang dilaporkan ke LOS DIY selama periode September 2010- Agustus 2011 jumlah kerugian masyarakat mencapai 140 miliar. BMT yang bermasalah antara lain BMT antarani dengan kerugian masyarakat RP. 32 miliar, BMT Isra dengan kerugian masyarakat Rp 15 miliar, dan BMT hilal dengan kerugian masyarakat Rp 22 miliar. (Ridarineni, Diunduh 9 Maret 2013 pukul 19.30 WIB)

Selain itu terdapat pembiayaan bermasalah. Nasabah yang wanprestasi akibat lalai memenuhi kewajibannya atau untuk melunasi hutang. Kewajiban dan hak tiap pihak sudah tercantum dalam perjanjian kredit atau akad pembiayaan. Masalah tersebut menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh lembaga keuangan baik itu koperasi maupun bank. Pada Bank Perkreditan Syariah (BPRS) mengalami pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF). Berikut tabel pembiayaan bermasalah di BPRS, sebagai berikut:

Tahun	2007	2008	2009	2010	2011	2012
NPF	7,98%	8,38%	7,03%	6,50%	6,11%	6,83%

(Syarif Hidayatullah. 2013:4)

Berdasarkan tabel diatas terjadi peningkatan pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh BPRS. Pembiayaan bermasalah pun juga menjadi permasalahan yang dihadapi oleh bank syariah tak terkecuali koperasi syariah, termasuk BMT Beringharjo Yogyakarta.

Salah satu BMT yang berkedudukan di Yogyakarta adalah BMT Beringharjo. BMT Beringharjo merupakan salah satu BMT yang besar dan sudah memiliki cabang di berbagai daerah. Hal ini dibuktikan dengan adanya cabang di berbagai daerah khususnya di pulau jawa dimana tersebar 12 kantor cabang di berbagai daerah pulau jawa yaitu Yogyakarta, Madiun, Bandung, Semarang, Caruban, Ngawi, Nganjuk, dan Kediri, dengan Assest kurang lebih 40 Miliar Rupiah. Saat

ini BMT ini memiliki aset Rp 74 milyar, sedang dana tersalur atau pembiayaan sekitar Rp 70 M dengan pembiayaan kepada anggota antara Rp 1 juta - Rp 5 juta. (Dinar Widiyanto, diunduh 29 januari 2013)

BMT beringharjo Yogyakarta tersebut juga tidak terlepas dari permasalahan. Masalahnya yaitu terletak pada beberapa klausul dalam akad *musyarakah*. Klausul-klausul tersebut sudah dibuat terlebih dahulu oleh BMT Beringharjo Yogyakarta, sehingga posisi tawar mitra dimungkinkan tidak seimbang.

Selain itu pada pelaksanaan akad pembiayaan *musyarakah*, terdapat pula suatu permasalahan yang muncul dari mitra sebagai pengelola dana atau pun dari BMT. Permasalahan tersebut terkait dengan tidak dipenuhinya kewajiban mitra untuk mengembalikan pinjaman modal usaha sehingga muncul pembiayaan bermasalah. Pada pelaksanaannya masih belum jelas penyelesaiannya, karena beberapa permasalahan setelah dimusyawarahkan masih belum menemui penyelesaian. Salah satu syarat untuk mendapatkan pembiayaan *musyarakah* yaitu mitra menyerahkan benda jaminan. Muncul permasalahan yaitu tanggung jawab mitra terhadap benda yang dikuasai oleh mitra, khususnya benda bergerak. Pengikat benda jaminan masih lemah di BMT Beringharjo Yogyakarta.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dapat dikatakan ada permasalahan-permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan akad pembiayaan *musyarakah* di BMT Beringharjo Yogyakarta. Oleh karena itu maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di BMT Beringharjo Yogyakarta. Mengenai pelaksanaan akad pembiayaan *musyarakah* di BMT Beringharjo Yogyakarta.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Masih terdapat beberapa BMT yang bermasalah.
2. Pembiayaan bermasalah dalam pelaksanaan akad pembiayaan *musyarakah* di BMT Beringharjo Yogyakarta.
3. Status benda jaminan saat terjadi pembiayaan bermasalah.
4. Mitra BMT menghilangkan benda jaminan benda jaminan dalam pelaksanaan akad pembiayaan *musyarakah* di BMT Beringharjo Yogyakarta.
5. Pengikat benda jaminan yang masih lemah dalam akad pembiayaan *musyarakah* di BMT Beringharjo Yogyakarta.

## **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas, agar peneliti dapat lebih fokus maka peneliti memberikan batasan masalah sebagai berikut:.

Pembiayaan bermasalah dalam pelaksanaan akad pembiayaan *musyarakah* di BMT Beringharjo Yogyakarta.

## **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka peneliti dapat mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad pembiayaan *musyarakah* di BMT Beringharjo Yogyakarta?
2. Hambatan dalam pelaksanaan akad pembiayaan *musyarakah* di BMT Beringharjo Yogyakarta?



## **E . Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pelaksanaan akad pembiayaan *musyarakah* di BMT Beringharjo Yogyakarta.
2. Mengetahui hambatan dalam pelaksanaan akad pembiayaan *musyarakah* di BMT Beringharjo Yogyakarta.

## **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian yang berjudul Pelaksanaan Akad *Musyarakah* di BMT Beringharjo Yogyakarta adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan di bidang hukum perdata, hukum dagang dan hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti, BMT Beringharjo, mitra dan masyarakat.

- a. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan suatu bentuk sarana berfikir secara ilmiah untuk mengembangkan, menambah pengetahuan, pengalaman yang telah peneliti dapatkan khususnya Hukum Perdata, Hukum Dagang

dan Hukum Islam di bangku kuliah pendidikan kewarganegaraan (PKn) .

b. Bagi BMT

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan pengetahuan tentang akad atau perjanjian secara umum, dan pada khususnya tentang kebebasan berkontrak dalam akad atau perjanjian bagi koperasi syariah khususnya BMT.

c. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang kebebasan berkontrak dalam akad atau perjanjian, serta koperasi syariah pada umumnya bagi masyarakat dan khususnya bagi para anggota koperasi syariah.

## **F. Batasan Istilah**

Untuk mencegah kesimpangsiuran pengertian serta pemahaman pembaca dan untuk menghindari multitafsir maka peneliti memberikan batasan istilah pada judul penelitian.

1. Pelaksanaan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pelaksanaan merupakan proses, cara, pembuatan melaksanakan. (Hasan Alwi dkk. 2008:774)

Pelaksanaan dalam penelitian ini adalah proses atau langkah-langkah melaksanakan isi dari akad dan pelaksanaan dalam menyelesaikan permasalahan dalam akad pembiayaan *musyarokah* di BMT Beringharjo.

## 2. Akad

Menurut UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 nomor (13) disebutkan bahwa akad adalah kesepakatan tertulis antara bank atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai prinsip syariah.

Akad adalah janji setia kepad Allah SWT, dan juga meliputi perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan sesama manusia dalam pergaulan hidupnya. (Phasaribu, Chairuman & Suhrawardi, 1994: 2)

Berdasarkan beberapa pengertian tentang akad di atas, maka akad adalah suatu perbuatan antara dua orang atau lebih yang saling berjanji atau mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu.

## 3. Pembiayaan *Musyarakah*

Menurut Kepmen Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 pada pasal 1 nomor 10 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, disebutkan bahwa pembiayaan *musyarakah* adalah akad kerjasama permodalan antara koperasi dengan satu pihak atau beberapa pihak sebagai pemilik modal pada usaha tertentu, untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai kesepakatan para pihak, sedang kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.

#### 4. *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

*Baitul maal wat tamwil* (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dana yang non-profit, seperti zakat, infaq dan shodaqoh. Sedangkan baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. (Heri Sudarsono. 2004: 100)

BMT adalah lembaga yang memadukan *Baitul Maal* (BM) dan *Baitul Tamwil* (BT), yaitu lembaga kemasyarakatan yang mengumpulkan dana masyarakat baik berupa simpanan maupun zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) untuk disalurkan kepada usaha-usaha kecil dengan sistem bagi hasil atau kepada dhuafa melalui sistem pinjaman kebajikan (qard al hasan) dan hibah. (Ahmad Sumiyanto. 2008:24)

Berdasarkan pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *Baitul Maal Wat Tamwil* adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat.

Jadi, yang dimaksud dengan judul penelitian pelaksanaan akad pembiayaan *musyarakah* di BMT Beringharjo Yogyakarta yaitu proses pelaksanaan isi dari akad pembiayaan *musyarakah*, yaitu antara BMT Beringharjo Yogyakarta dan mitra dalam memenuhi kewajiban dan hak mereka.